

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

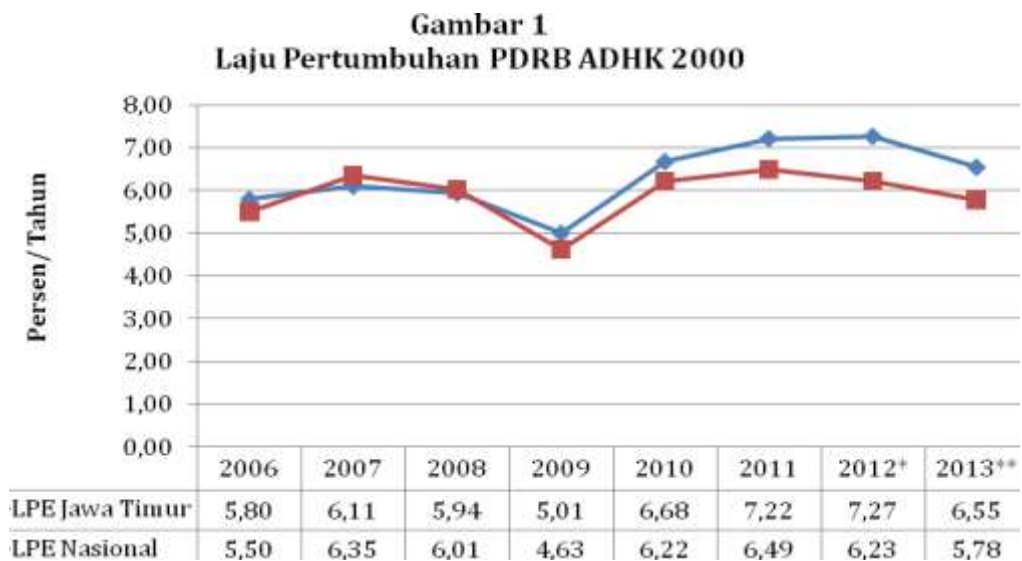
Perkembangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

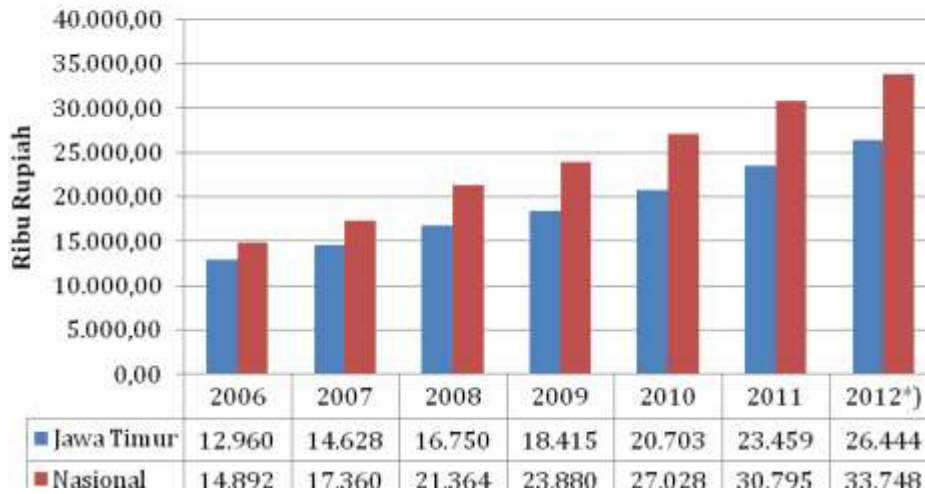
Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis di bidang industri karena terletak di antara Jawa Tengah dan Bali sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri dan perdagangan. Kinerja perekonomian Jawa Timur selama periode 2006-2013 cukup baik, terlihat dari nilai PDRB yang tumbuh pada laju rata-rata 6,32 persen per tahun (Gambar 1). Laju ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,90 persen per tahun pada periode yang sama. Di tingkat wilayah, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan output PDRB terbesar kedua setelah DKI Jakarta dengan sumbangan sebesar 25,28 persen terhadap pembentukan PDRB Wilayah Jawa-Bali dan sebesar 14,88 persen terhadap pembentukan PDB nasional (2013).



Sumber: BPS, 2013

Laju pertumbuhan tersebut belum cukup untuk mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita Jawa Timur dari angka rata-rata nasional. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB/kapita Jawa Timur dan PDB/kapita nasional adalah sebesar 87,03 persen, maka pada tahun 2013 rasionya berkurang menjadi 78,36 persen (Gambar 2).

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

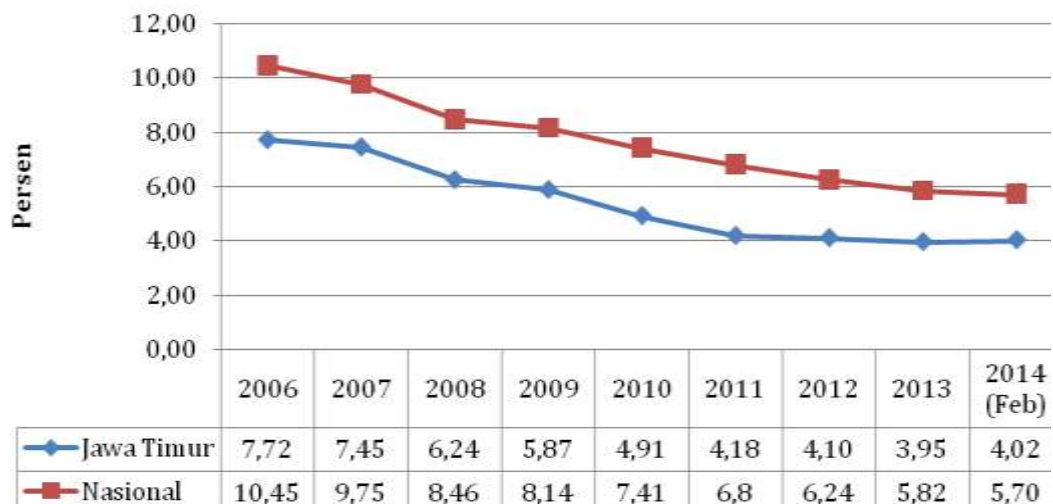


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun. Bahkan dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional, TPT Provinsi Jawa Timur termasuk rendah. Tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah selama 2006-2013 berkurang sebesar 3,77 persen (Gambar 3). Namun demikian rendahnya tingkat pengangguran di tengah pendapatan per kapita yang rendah ini mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah.

Gambar 3.
Tingkat Pengangguran Terbuka

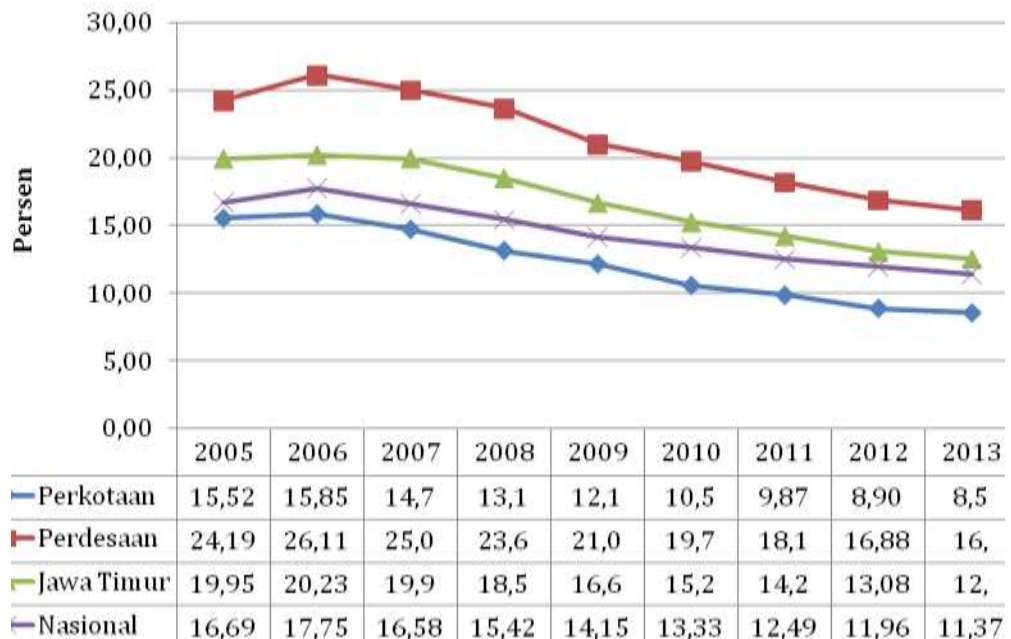


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi juga memberi dampak positif bagi penurunan kemiskinan wilayah. Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur cenderung menurun selama periode 2006-2013, khususnya di perkotaan. Namun demikian secara nasional tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih tergolong cukup tinggi. Jika pada tahun 2011 persentase penduduk miskin nasional sudah mencapai 11,37 persen, maka tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih mencapai 12,5 persen.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2014

B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

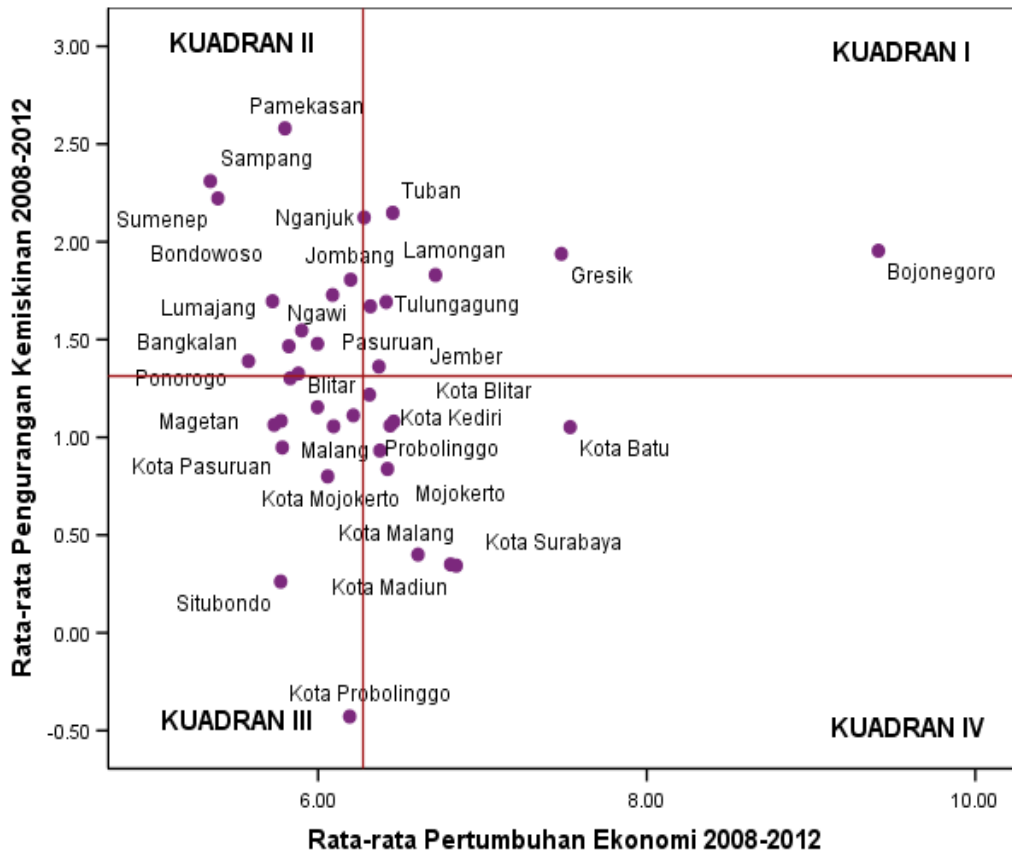
Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Tulungagung, Jember, Pasuruan, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*).

Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, Kabupaten Trenggalek, Malang, Lumajang, Banyuwangi, Ngawi, Pamekasan, dan Sumenep yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti industri manufaktur, pertanian, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, kabupaten Pacitan, Ponorogo, Blitar, Kediri, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Madiun, Magetan, Bangkalan, Sampang, Kota Kediri, Kota Pasuruan, dan Kota Mojokerto terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan

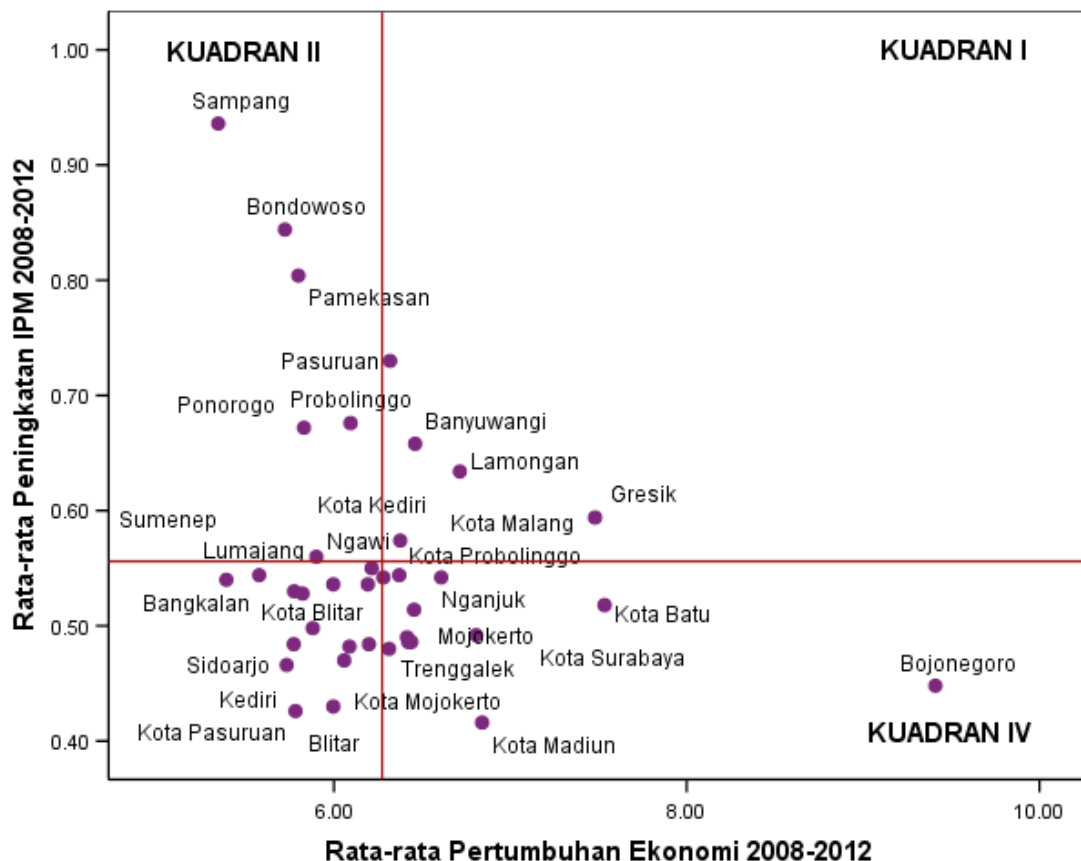
produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Mojokerto, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertama, Kabupaten Banyuwangi, Lamongan, Gresik, Pasuruan, dan Kota Malang yang terletak pada Kuadran I dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi

sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Sampang, Bondowoso, Pamekasan, Probolinggo, Ponorogo, dan Lumajang yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi seperti Industri manufaktur, pertanian, perdagangan, dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Ngawi, Bangkalan, Sidoarjo, Kediri, Blitar, Mojokerto, Trenggalek, Kota Blitar, Kota Mojokerto, dan Kota Pasuruan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Keempat, Kabupaten Nganjuk, Mojokerto, Bojonegoro, Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Madiun terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

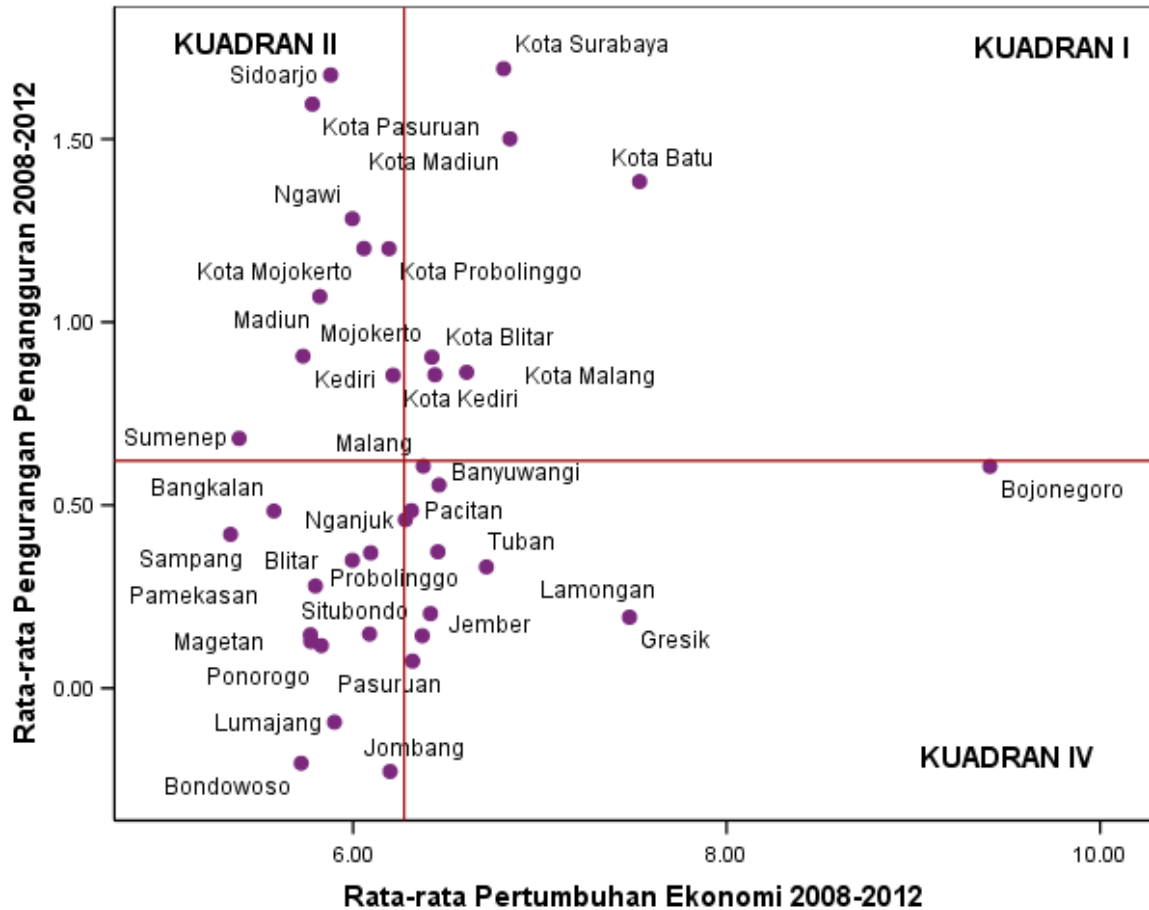
Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Kediri, dan Kota Blitar termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri manufaktur, pertanian, perdagangan dan jasa.

Kedua, Kabupaten Sidoarjo, Ngawi, Madiun, Mojokerto, Kediri, Sumenep, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah.

Ketiga, Kabupaten Kabupaten Bangkalan, Nganjuk, Smapang, Pamekasan, Blitar, Magetan, Ponorogo, Lumajan, Bondowoso, Jombang, Situbondo, dan Probolinggo terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di

bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Rata-rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



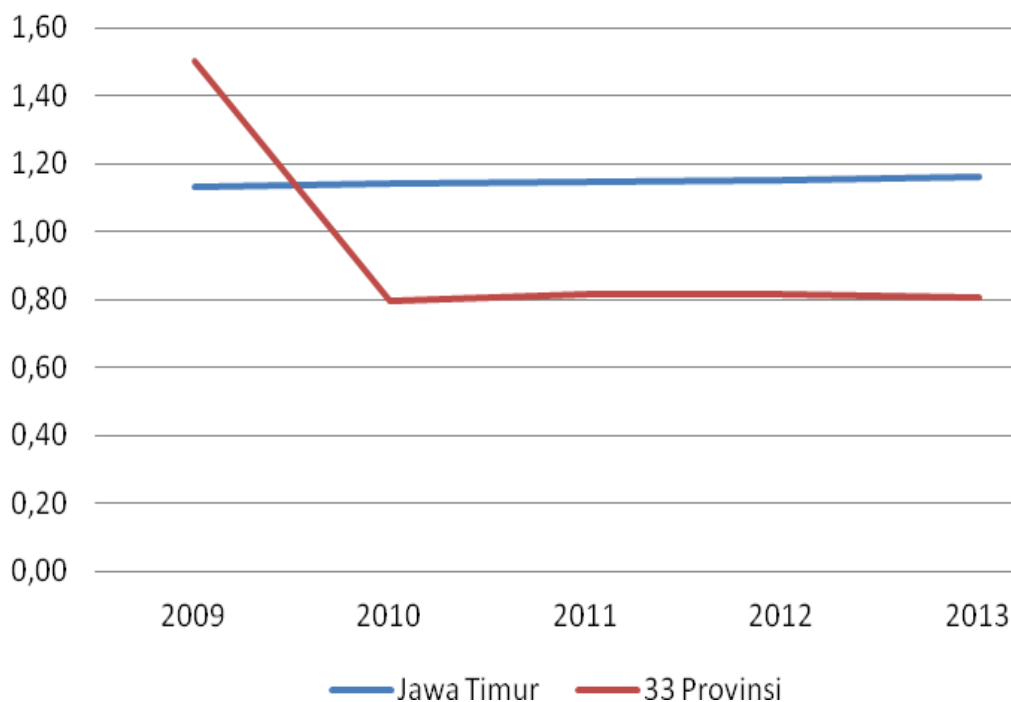
Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Keempat, Kabupaten Banyuwangi, Pacitan, Tuban, Lamongan, Gresik, Jember, Pasuruan, dan Bojonegoro terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti industri pengolahan, pertanian perdagangan, jasa. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dalam 4 tahun terakhir berada di atas nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Penyebab kesenjangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur adalah struktur perekonomian masyarakat. Daerah dengan struktur perekonomian primer pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan struktur perekonomian tersier dan sekunder

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Kota Kediri memiliki PDRB tertinggi diantara kabupaten dan kota di Jawa Timur karena didukung industri besar skala internasional. Keberadaan perusahaan rokok PT Gudang Garam banyak berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Kota-kota yang memiliki struktur perekonomian didominasi industri dan jasa memiliki pendapatan perkapita yang tinggi di Jawa Timur

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**
Pacitan	4.321	4.976	5.532	6.182	6.879	7.740
Ponorogo	5.781	6.656	7.527	8.687	9.772	11.028
Trenggalek	5.969	6.903	7.728	8.679	9.800	11.092
Tulungagung	11.482	13.257	14.734	16.407	18.416	20.642
Blitar	7.836	8.970	9.899	10.989	12.277	13.645
Kediri	7.520	8.435	9.314	10.397	11.590	12.972
Malang	9.085	10.391	11.430	12.788	14.502	16.479
Lumajang	9.742	11.139	12.330	13.755	15.397	17.210
Jember	7.501	8.784	9.744	10.804	12.102	13.658
Banyuwangi	10.328	11.899	13.368	14.911	16.850	19.566
Bondowoso	6.790	7.762	8.537	9.458	10.568	11.866
Situbondo	9.079	10.344	11.447	12.734	14.254	16.046
Probolinggo	9.589	10.966	12.128	13.540	15.205	17.017
Pasuruan	7.243	8.305	9.154	10.363	11.608	13.078
Sidoarjo	21.670	24.113	26.328	28.953	33.023	37.319
Mojokerto	12.628	14.413	15.804	17.728	20.137	22.746
Jombang	8.240	9.508	10.468	11.656	13.187	12.880
Nganjuk	7.606	8.776	9.702	10.785	12.032	13.545
Madiun	7.377	8.440	9.257	10.386	11.678	13.173
Magetan	8.239	9.589	10.596	11.869	13.268	14.832
Ngawi	6.153	7.056	7.880	8.838	9.869	11.094
Bojonegoro	9.425	11.397	13.940	18.297	22.696	24.669
Tuban	11.688	13.655	15.257	16.969	19.054	21.301
Lamongan	6.757	7.726	8.778	9.961	11.353	12.877
Gresik	21.623	24.805	28.644	32.786	37.242	41.957
Bangkalan	6.061	6.850	7.462	8.201	9.192	10.345
Sampang	5.015	5.589	6.077	6.488	7.293	8.069
Pamekasan	4.547	5.117	5.580	6.151	7.016	7.869
Sumenep	7.691	8.686	9.602	10.709	12.037	13.467
Kota Kediri	145.758	167.653	189.276	212.439	241.917	275.380
Kota Blitar	10.764	12.343	13.759	15.324	17.130	19.189
Kota Malang	25.858	30.388	33.344	37.423	41.494	46.451
Kota Probolinggo	15.616	17.881	19.704	21.878	24.108	26.721
Kota Pasuruan	10.084	11.528	12.687	14.146	15.862	17.551
Kota Mojokerto	16.285	18.639	20.566	23.187	25.968	29.084
Kota Madiun	19.901	23.113	25.707	29.140	33.091	37.249
Kota Surabaya	52.569	59.520	64.898	73.941	84.513	94.684
Kota Batu	11.734	13.578	15.157	17.047	19.334	21.711
JAWA TIMUR	14.629	16.807	18.415	20.703	23.469	26.445

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Ketergantungan Pada Sektor Primer, Khususnya Pertanian

Struktur perekonomian Provinsi Jawa Timur didominasi sektor perdagangan (31,34 persen) diikuti industri pengolahan (26,60 persen), dan pertanian (14,91 persen). Sementara itu peranan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah. Pangsa sektor utilitas (listrik, gas, air), dan konstruksi di bawah 5 persen dalam PDRB (Tabel 2). Dari sisi pertumbuhan sektoral, pendorong utama pertumbuhan ekonomi wilayah adalah sektor perdagangan dan pertanian. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap pembentukan nilai PDRB wilayah dan juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu lebih dari 40 persen tenaga kerja berada di sektor pertanian.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	14.91	7,31
2.	Pertambangan	2.00	0,10
3.	Industri Pengolahan	26.60	9,85
4.	Listrik, Gas, Air Minum	1.29	1,60
5.	Konstruksi	4.74	4,48
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	31.34	32,14
7.	Angkutan, Telekomunikasi	5.94	11,08
8.	Keuangan	5.10	7,31
9.	Jasa-jasa	8.09	15,08
		100.00	100.00

Sumber: BPS, 2013

Kuatnya peran ketiga sektor (perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian) dalam perekonomian daerah juga bisa dilihat dari analisis sektor basis (Tabel 3). Di antara sektor-sektor *tradable* (dapat diperdagangkan antardaerah), untuk sektor perdagangan sub sektor perdagangan besar dan eceran, restoran dan hotel memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) lebih besar dari satu; untuk sektor industri pengolahan industri tanpa migas yang meliputi industri makanan, minuman, dan tembakau, industri kertas dan barang cetakan, industri semen dan barang galian bukan logam, industri logam dasar besi dan baja, dan industri barang lainnya; dan untuk sektor pertanian komoditas tanaman pangan dan peternakan memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) lebih besar dari satu. Hal ini menunjukkan Jawa Timur memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor-sektor tersebut.

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,16	1,15	1,14	1,12	1,10
a. Tanaman Bahan Makanan	1,29	1,27	1,26	1,25	1,24
b. Tanaman Perkebunan	1,04	1,07	1,04	1,02	0,97
c. Peternakan	1,55	1,55	1,53	1,51	1,48
d. Kehutanan	0,27	0,26	0,29	0,30	0,37
e. Perikanan	0,89	0,89	0,87	0,82	0,80
2. Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,08	0,09	0,12	0,13	0,13
b. Pertambangan Bukan Migas	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07
c. Penggalian	1,73	1,66	1,63	1,58	1,50
3. Industri Pengolahan	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	1,08	1,08	1,07	1,05	1,04
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,93	1,73	1,74	1,75	1,74
a. Listrik	2,09	1,95	1,98	2,00	1,99
b. Gas	2,16	1,63	1,61	1,54	1,47
c. Air Bersih	0,84	0,83	0,84	0,89	0,91
5. Konstruksi	0,51	0,50	0,50	0,51	0,50
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1,70	1,77	1,79	1,79	1,81
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,68	1,76	1,77	1,75	1,77
b. Hotel	1,22	1,21	1,28	1,26	1,22
c. Restoran	1,99	1,96	2,07	2,21	2,27
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,83	0,80	0,78	0,78	0,77
a. Pengangkutan	1,01	1,02	1,01	1,01	1,02
1). Angkutan Rel	1,30	1,25	1,36	1,54	1,56
2). Angkutan Jalan Raya	0,80	0,78	0,77	0,75	0,74
3). Angkutan Laut	0,66	0,68	0,68	0,71	0,72
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,36	0,21	0,13	0,12	0,11
5). Angkutan Udara	1,03	1,12	1,06	1,05	1,07
6). Jasa Penunjang Angkutan	1,67	1,65	1,70	1,71	1,72
b. Komunikasi	0,68	0,66	0,63	0,63	0,62
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,57	0,56	0,57	0,57	0,57
a. Bank	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,82	0,80	0,84	0,89	0,91
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,69	0,69	0,69	0,70	0,71
e. Jasa Perusahaan	0,81	0,76	0,74	0,70	0,67

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
9. Jasa-jasa	0,98	0,97	0,95	0,93	0,92
a. Pemerintahan Umum	0,72	0,73	0,71	0,69	0,70
b. Swasta	1,19	1,16	1,14	1,11	1,07
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,58	0,57	0,57	0,55	0,54
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,74	0,73	0,76	0,82	0,81
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	1,47	1,43	1,39	1,34	1,30

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja. Selama periode 2010-2014, meski pangsaanya masih kecil sektor industri pengolahan mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian. Selain sektor industri pengolahan dan perdagangan, sektor potensial dan cukup produktif dalam menyerap tenaga kerja besar adalah sektor jasa.

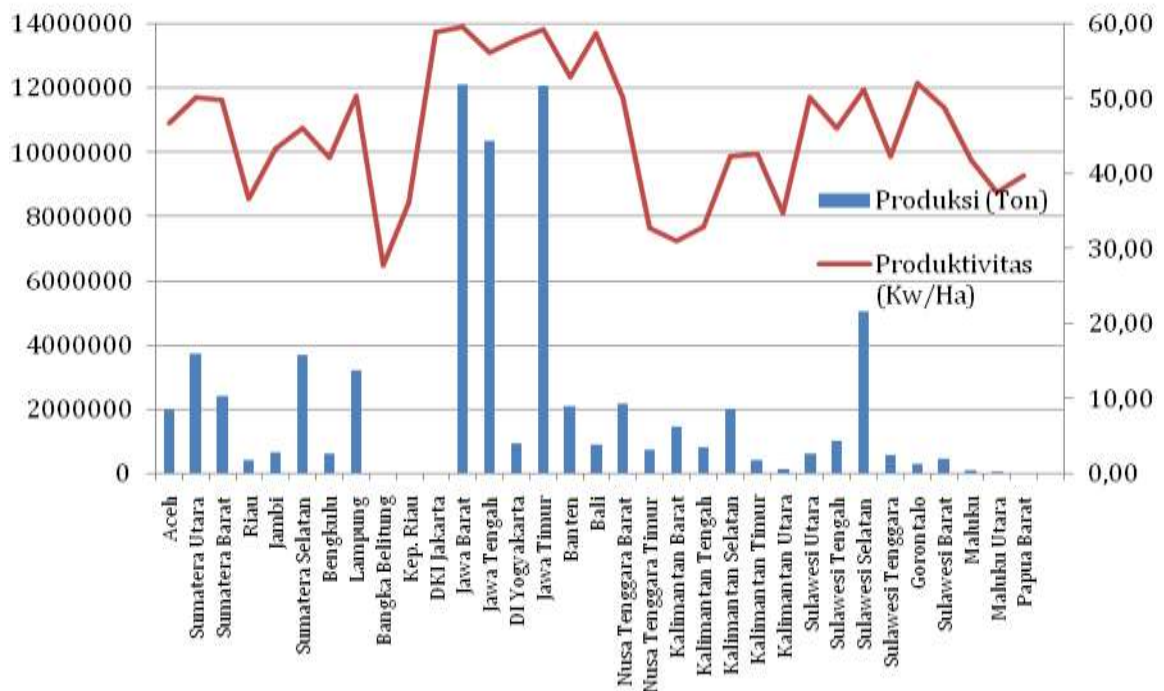
Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	8.307.066	7.330.701	-976.365
2	Pertambangan	142.016	171.581	29.565
3	Industri Pengolahan	2.500.781	2.844.342	343.561
4	Listrik, Gas, Air	30.574	36.615	6.041
5	Bangunan	882.806	1.219.168	336.362
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	3.909.487	4.332.275	422.788
7	Angkutan & Telekomunikasi	885.385	694.999	-190.386
8	Keuangan	260.554	423.438	162.884
9	Jasa-Jasa	2.692.871	2.832.270	139.399
	Total	19.611.540	19.885.389	273.849

Sumber : BPS, 2013

Salah satu peran penting Jawa Timur bagi perekonomian wilayah dan nasional adalah sebagai lumbung pangan. Produksi padi daerah ini memiliki surplus yang berpotensi mendukung ketahanan pangan wilayah. Secara nasional Jawa Timur merupakan penghasil padi terbesar kedua setelah Jawa Barat dengan produksi mencapai 12,05 juta ton padi kering giling pada tahun 2013. Dengan asumsi faktor konversi padi ke beras sebesar 62,74 persen, dan tingkat konsumsi beras per kapita 139,15 kg per tahun, maka Jawa Timur berpotensi memiliki surplus beras sebesar 2,22 juta ton. Angka ini cukup signifikan untuk mendukung target surplus beras nasional sebesar 10 juta ton beras per tahun. Sejalan dengan produksi yang tinggi, tingkat produktivitas padi di Jawa Timur adalah yang tertinggi secara nasional, dengan tingkat produktivitas sebesar 59,15 kuintal per hektar. Mengingat peran pentingnya, lahan pertanian pangan di Jawa Timur perlu dipertahankan dengan mengendalikan konversi lahan pertanian pangan

Gambar 9
Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi 2013



Sumber: BPS, 2013

2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Jika PDRB dianalisis dari sisi penggunaan, peranan konsumsi rumah tangga sangat besar dengan pangsa lebih dari 60 persen. Sedangkan pangsa investasi (Pembentukan Modal tetap Bruto) yang sangat penting bagi pertumbuhan daerah hanyalah sekitar 19,75 persen (Tabel 5). Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk memproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Namun demikian terdapat tren meningkatnya pertumbuhan investasi. Meskipun konsumsi rumah tangga masih tetap merupakan sumber utama pertumbuhan daerah, namun selama periode 2005-2009 peran

investasi semakin meningkat dan menggeser konsumsi pemerintah sebagai sumber pertumbuhan kedua.

Tabel 5
PDRB Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	67,41	70,14
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,61	0,63
3.	Konsumsi Pemerintah	6,63	6,39
4.	PMTB	19,75	18,12
5.	Perubahan Stok	0,88	0,93
6.	Ekspor	51,53	50,97
7.	Impor	46,80	47,19
	Total	100,00	100,00

Sumber : BPS, 2013

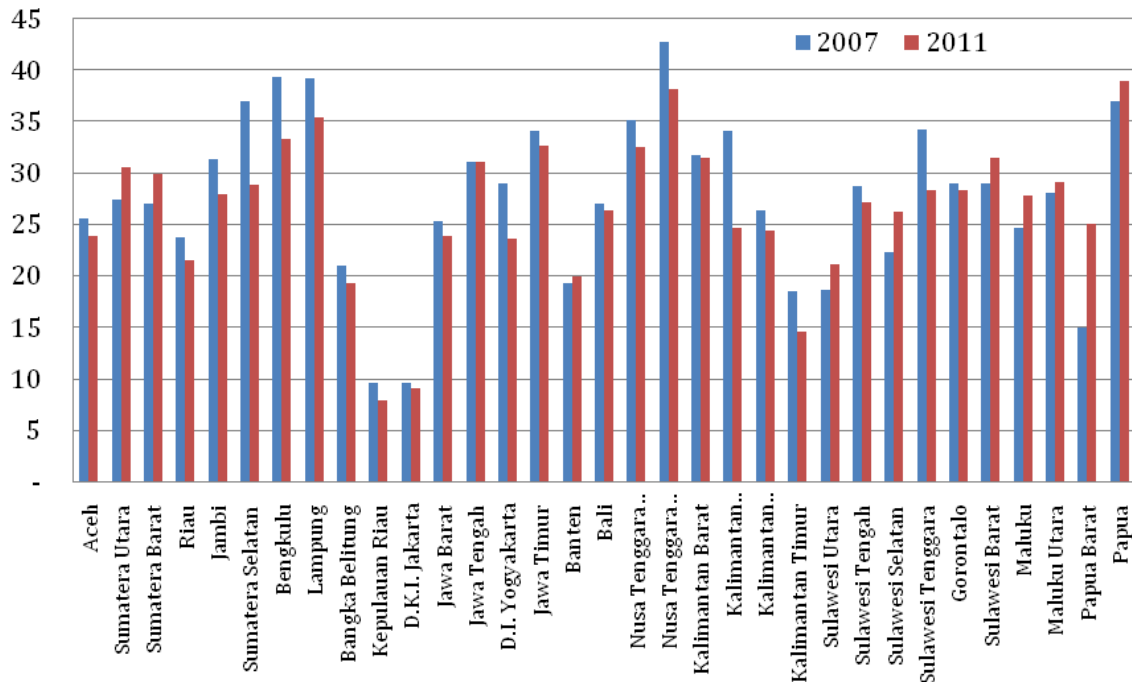
Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan. Dalam hal ini meski semua kabupaten di Provinsi Jawa Timur telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun masih perlu dipastikan bahwa implemetasi PTSP tersebut dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, baik dalam hal biaya maupun waktu yang dibutuhkan.

3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja

Fakta tingginya persentase kemiskinan daerah yang diiringi dengan tingkat pengangguran yang tinggi tampaknya berkaitan erat dengan rendahnya kualitas pekerjaan yang tersedia di daerah. Hal ini bisa ditelusuri dari besarnya jumlah pekerja bebas di sektor pertanian, pekerja bebas di sektor non-pertanian, dan pekerja tidak dibayar. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi. Perkembangan tingkat perkerja yang kurang berkualitas di Jawa Timur porsinya menurun dari tahun 2007 ke 2011, namun persentase pekerjaan kurang berkualitas di Jawa Timur masih termasuk tinggi secara nasional. Pada tahun 2011 persentase pekerjaan kurang berkualitas di Jawa Timur mencapai sekitar 32,63 persen menurun jika dibandingkan pada tahun 2007 yang mencapai 34,04 persen, dan kondisi ini lebih baik dibandingkan terhadap Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Jika kita sandingkan fakta ini dengan fakta lain penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian dan rendahnya produktivitas, maka kebijakan pembangunan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan sektor industri. Pengembangan industri yang sesuai oleh karena adalah industri berbasis pertanian dalam arti luas (agroindustri) yang didukung oleh rantai perdagangan (agrobisnis).

Gambar 10
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Posisi Jawa Timur yang cukup strategis dan merupakan pintu gerbang bagian timur Pulau Jawa-Bali dan perdagangan antar wilayah Jawa-Bali dengan provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian timur memiliki dukungan transportasi yang cukup memadai, baik transportasi laut, udara dan darat. Sementara untuk interkoneksi transportasi darat dan secara keseluruhan wilayah Jawa Timur dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 45.589 km. Jika dilihat dari sisi kuantitas ketersediaan jaringan jalan di Jawa Timur relatif memadai. Hal ini terlihat dari indikator kerapatan jalan, yang menunjukkan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen (Tabel 6). Angka kerapatan jalan (*road density*) di wilayah ini lebih tinggi dari angka nasional dan berada pada peringkat 4 nasional.

Cara lain untuk mengetahui tingkat defisiensi infrastruktur wilayah adalah dengan menganalisisnya dalam konteks perbandingan dengan wilayah lainnya. Hal ini didasari asumsi bahwa terdapat korelasi antara kerapatan jalan dan tingkat pendapatan per kapita di suatu perekonomian. Dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan yang positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 11).

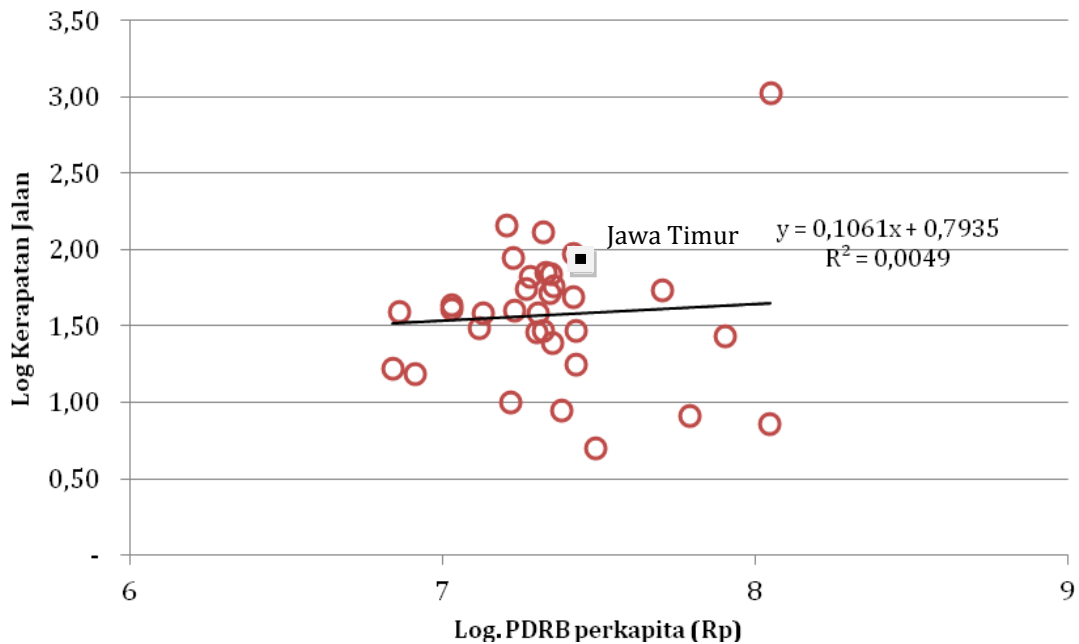
Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu perekonomian, maka kerapatan jalannya cenderung semakin tinggi pula. Wilayah yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Jawa Timur relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain. Dengan demikian panjang jalan bukanlah masalah utama bagi Jawa Timur.

Gambar 11
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, lebih dari 80 persen panjang jalan di Jawa Timur dengan jenis permukaan beraspal (Tabel 7). Kondisi ini tentu akan meningkatkan daya dukung jalan bagi pergerakan barang. Kondisi jalan yang baik akan mengurangi waktu tempuh perjalanan dan menurunkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya akan mempercepat perdagangan antar wilayah dan mendorong terhadap perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan dan kualitas jalan yang menghubungkan antarwilayah. Namun demikian, hanya 41 persen jalan negara dalam kondisi baik, sisanya dalam kondisi sedang dan rusak. Demikian pula kondisi jalan provinsi dan kabupaten, masing-masing hanya 51 persen dan 55 persen dalam kondisi baik. Tingginya tingkat kerusakan jalan ini tentu menjadi penghambat peningkatan produktivitas sektor pertanian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pengembangan industri lokal.

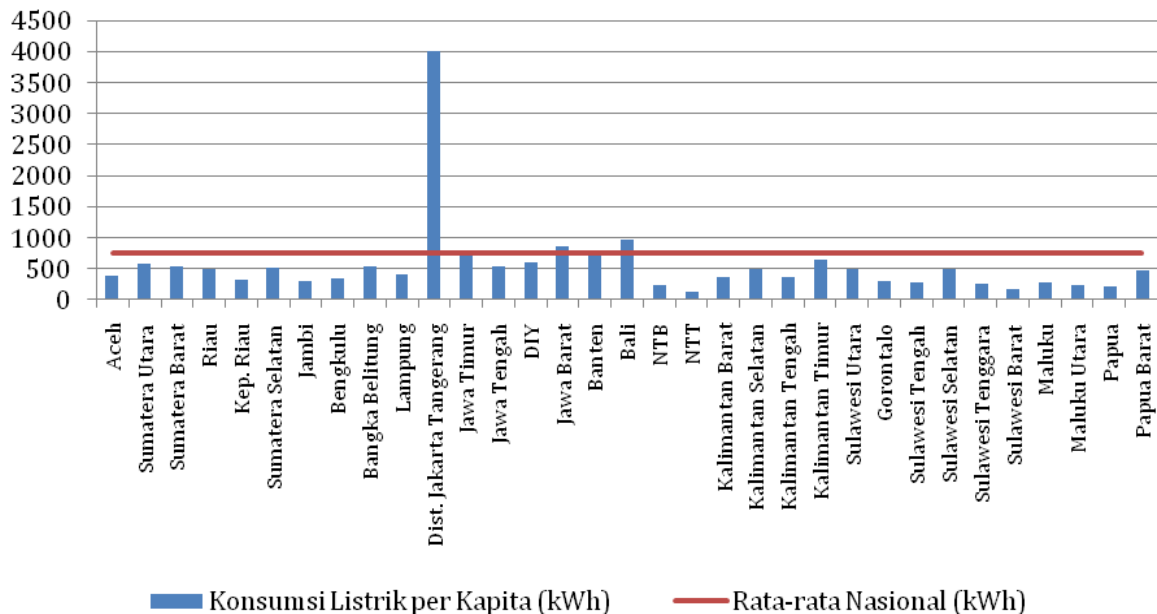
Tabel 7
Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Jawa Timur	1.628	81	216	11	150	7	8	0	2.001	100
Jawa	11.081	73	896	6	625	4	2.688	17	15.270	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2012

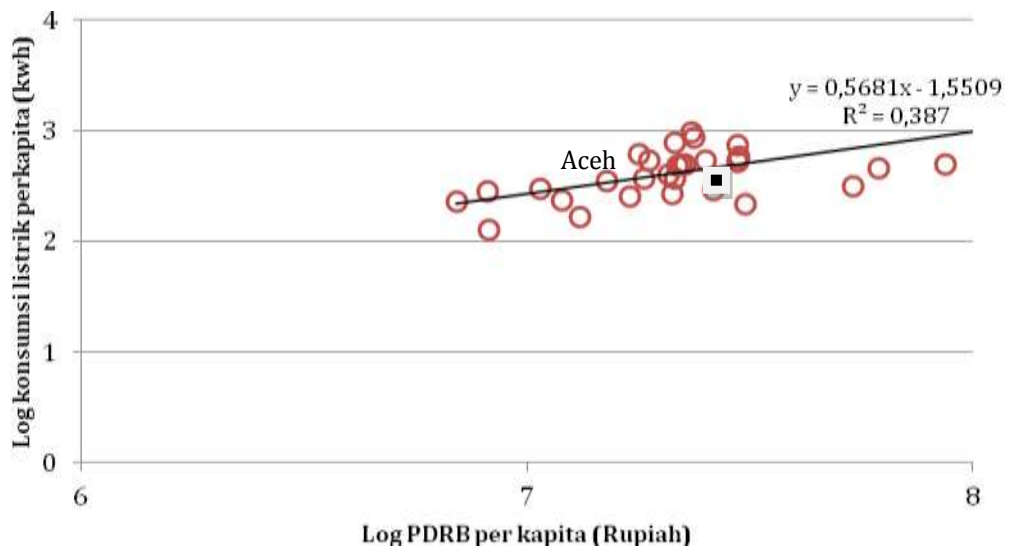
Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Jawa Tengah termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 12). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita.

Gambar 12
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 13
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013



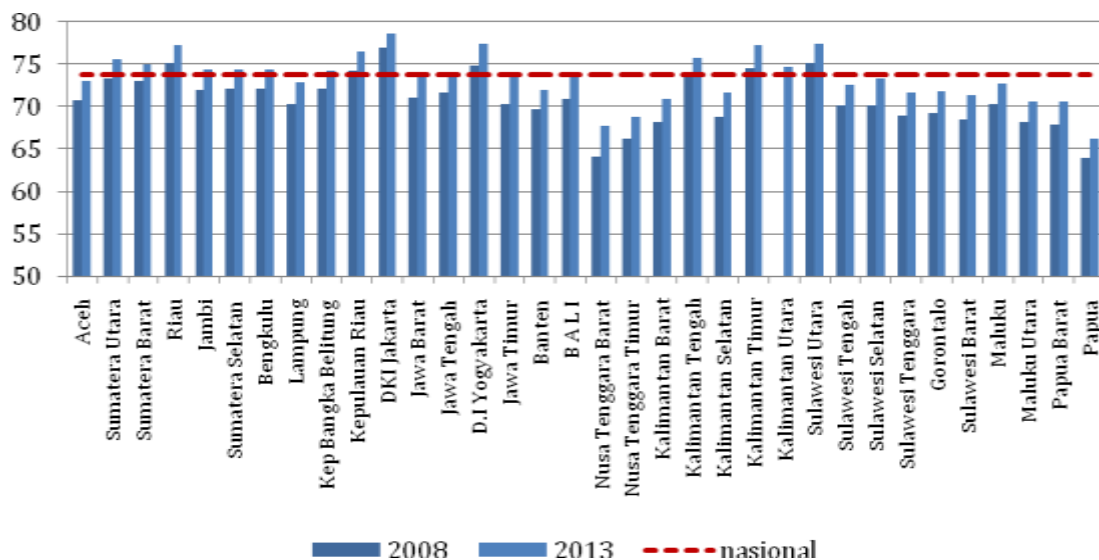
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

Dengan menggunakan data 33 provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDRB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 13). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Posisi Jawa Timur berada di atas kurva linier, menunjukkan Provinsi Jawa Timur tidak mengalami defisiensi kelistrikan.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari 33 provinsi yang ada, Jawa Timur berada pada peringkat ke-18 (Gambar 14). Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 69,1 tahun pada tahun 2008 menjadi 70,37 tahun pada tahun 2013. Pada indikator rata-rata lama sekolah, terjadi perbaikan dari 6,95 tahun pada tahun 2008 menjadi 7,53 tahun pada tahun 2013. Demikian juga pada indikator angka melek huruf, capaian di Jawa Timur pada tahun 2008 adalah 87,43 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 90,49 persen.

Gambar 14
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 Feb	Perubahan
1	≤ SD	11.391.112	10.597.437	(793.675)
2	SMTP	3.749.766	3.662.839	(86.927)
3	SMTA Umum	3.877.433	4.573.301	695.868
5	Diploma I/II/III/Akademi	383.483	370.891	(12.592)
6	Universitas	776.796	1.513.306	736.510
Total		20.178.590	20.717.774	539.184

Sumber: BPS, 2013

Perbaikan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur tercermin dari komposisi angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 24,97 persen pada tahun 2008 menjadi 31,17 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Perbaikan struktur angkatan kerja ini perlu terus didorong untuk mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis perdagangan dan jasa.

6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Terdapat hubungan yang saling menentukan antara tabungan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian yang terjadi di Jawa Timur tampaknya adalah keterbatasan tabungan sebagai sumber permodalan permodalan. Hal ini ditunjukkan oleh rasio kredit terhadap simpanan pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang hampir selalu lebih besar jika dibandingkan terhadap Pulau Jawa Bali dan Nasional. Pada tahun 2013 rasio pinjaman terhadap simpanan adalah 1,03, rasio kredit terhadap simpanan tahun 2013 untuk wilayah Jawa adalah 0,84 dan rasio untuk nasional adalah 0,92 (Tabel 9). Hal ini mengindikasikan terbatasnya potensi simpanan masyarakat di Jawa Timur

Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Jawa Timur	337.563	348.542	1,03	0,67
Jawa Bali	2.785.534	2.357.461	0,84	0,42
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

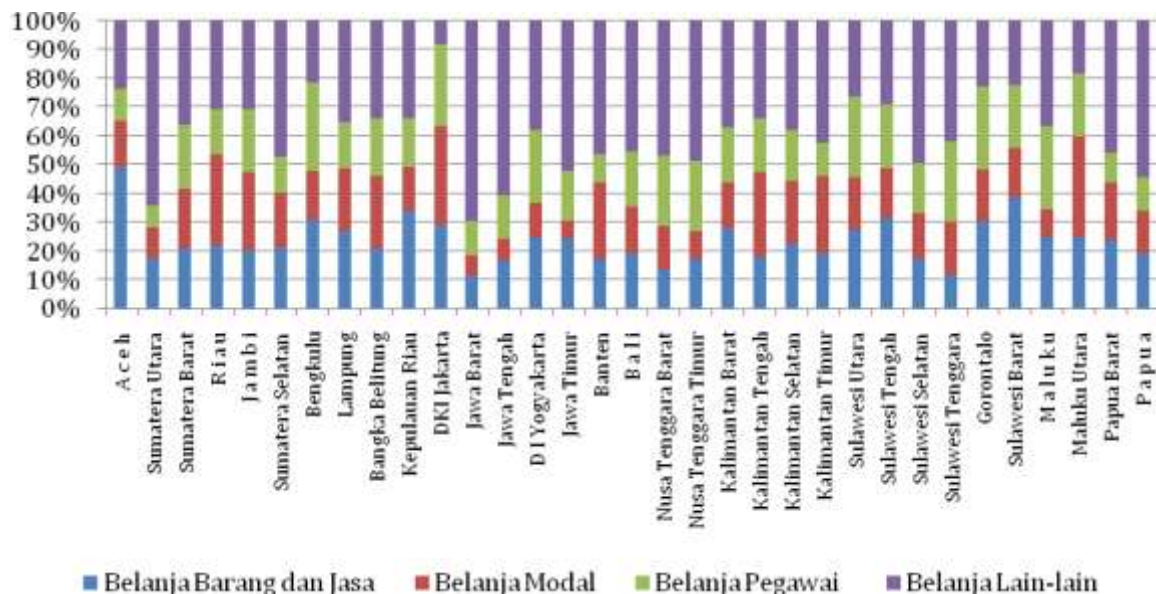
Sumber: BPS, 2013

Rasio investasi (PMTB) terhadap simpanan masyarakat masih kurang dari satu (0,67), artinya sebenarnya potensi simpanan masyarakat masih mencukupi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Jawa Timur adalah bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan. Oleh karena itu selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat, juga diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat di sektor produktif.

7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Meski secara umum porsi investasi pemerintah relatif kecil dibandingkan dengan porsi investasi oleh swasta, namun perannya sangat penting dan tidak tergantikan. Hal ini karena investasi pemerintah umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable* dan atau *non rivalry*. Pada sektor-sektor seperti ini swasta tidak tertarik untuk membangunnya. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya. Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Gambar 15
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

Terkait dengan hal ini komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja (pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Jawa Timur) sebesar 6,11 persen (Gambar 15). Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Prospek pertumbuhan daerah cukup baik bila dilihat dari beberapa modal pembangunan yang dimiliki, di antaranya kesenjangan internal yang rendah, dan prospek integrasi ekonomi daerah ke dalam pengembangan ekonomi Jawa. Indeks Gini, yang mengukur tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Jawa Timur, selama periode 2008-2013 meningkat dari 0,31 menjadi 0,39. Sementara itu pada saat yang sama Indeks Gini tingkat nasional juga meningkat dari 0,35 menjadi 0,40. Tingkat kesenjangan yang rendah akan menciptakan suasana yang kondusif bagi upaya penurunan kemiskinan, peningkatan kerukunan sosial, dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan.

Realisasi percepatan pengembangan ekonomi Jawa diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Manfaat dari proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan diperkirakan tak hanya memberi manfaat kota bersangkutan tetapi juga wilayah sekitarnya. Berdasarkan pada kinerja pembangunan selama ini serta modal pembangunan yang dimiliki dapat digambarkan prospek Jawa Timur dalam mencapai target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 6,2 – 7,9 persen dapat tercapai. Kinerja ekonomi di Jawa yang stabil turut didukung oleh ekspor manufaktur yang terus meningkat di tahun 2015 seiring dengan prospek perbaikan ekonomi global. Pengembangan infrastruktur di Jawa Timur turut mendukung meningkatnya perekonomian di daerah. Kegiatan investasi juga akan meningkat didorong meningkatnya investasi pembangunan pabrik smelter di Gresik, Tuban, dan Lumajang.
2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur terus dilakukan agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 12,0 – 8,7 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 12,5 persen. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Jawa Timur harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 3,8 poin persentase atau 0,63 poin persentase per tahun.
3. Namun demikian perlu dipertimbangkan bahwa prospek pencapaian sasaran-sasaran utama tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan, baik internal daerah Provinsi Jawa Timur maupun eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah, di antaranya melalui transmisi perdagangan khususnya komoditas ekspor pertambangan dan pertanian.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian;
- b. Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja berkualitas;
- c. Peningkatan investasi di daerah;
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha;
- g. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah.

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pengendalian konversi lahan pertanian;
- c. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi *brand/citra* komoditas unggulan daerah;
- d. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- e. Perbaikan kualitas jaringan jalan;
- f. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
- g. Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
- h. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- i. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

